

MEMO HUKUM

HANIE VIONITA

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
DALAM USAHA MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH**

KK
Jed 197/96
Vio
Pa



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

1995

**PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
DALAM USAHA MENCIPTAKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH**



KK
Jat - 197/96
Via
P.

GILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing

Reinhard Rahaningmas, S.H., MS.

NIP. 130162049

Penyusun

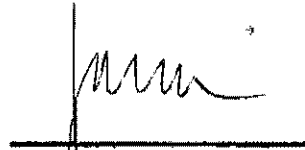
Hanie Vionita

NIM. 039213471

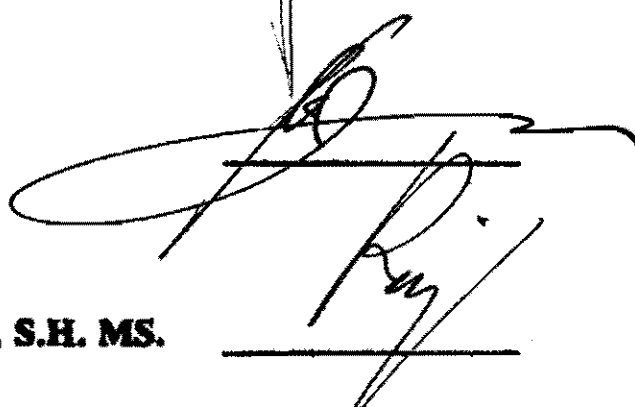
Telah diuji pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 1995.

Panitia Penguji :

Ketua : R. Djoko Soemadijo, S.H.



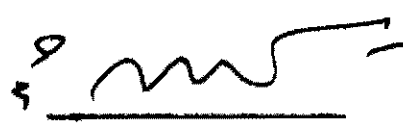
Sekretaris : Dr. Harjono, S.H., MCL.



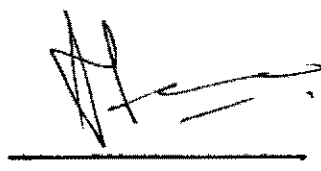
Anggota : 1. Reinhard Rahaningmas, S.H. MS.



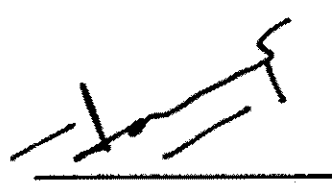
2. Emanuel Sujatmoko, S.H., MS.



3. Sumardji, S.H.



4. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



pelayanan masyarakat.

5. Cepatnya pengurusan kepegawaian, seperti masalah kenaikan pangkat, pensiun, dan sebagainya.

Jadi keberhasilan program pengawasan melekat di lingkungan aparatur pemerintah dapat dilihat dari berbagai indikator seperti yang telah disebutkan di atas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

1. Pengawasan melekat yang terlaksana dengan baik tidak dapat dilepaskan dari peranan pimpinan (atasan langsung) yang diwajibkan untuk menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di lingkungan tugasnya masing-masing.
2. Pengawasan melekat merupakan usaha untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih yaitu dengan melalui tindakan preventif dan represif dalam pelaksanaan pengawasan melekat, karena dengan tindakan preventif tersebut dapat dicegah peluang terjadinya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tindakan-tindakan penyelewengan lainnya. Sedangkan tindakan represif itu dapat dikenakan terhadap aparat pemerintah yang melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat

menghambat pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

B. Saran :

1. Perlu ditingkatkan kualitas aparatur pemerintah yang disiplin dan bersih dalam pelaksanaan pengawasan melekat.
2. Upaya preventif perlu ditingkatkan guna mencegah peluang timbulnya penyalahgunaan wewenang, kebocoran keuangan negara dan tindakan-tindakan negatif lainnya yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
3. Perlunya penanganan tindak lanjut yang bersifat represif secara tepat dan benar agar pelaksanaan fungsi pengawasan tidak menjadi sia-sia dan hanya merupakan tindakan tidak efisien dan pemborosan belaka.